

## TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

### *Community Participation Level in the Implementation of Processing and Marketing Business Development Program*

\*Rismutia Hayu Deswati dan Riesti Triyanti

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan  
Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

\*email: rismutia.hd@gmail.com

Diterima 13 Maret 2015 - Disetujui 6 Juni 2015

#### ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (PUMP P2HP) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program; (2) Mengidentifikasi perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUMP P2HP. Penelitian menggunakan metode survei di 6 lokasi yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kota Aceh, Kota Sibolga, Kota Makasar dan Kabupaten Banjar. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif frekuensi untuk mengetahui tingkat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi serta analisis chi square untuk melihat perbedaan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap persiapan di 6 lokasi masuk kategori sedang senilai 58%, pada tahap pelaksanaan masuk kategori tinggi dengan skor 77% dan tahap evaluasi masuk kategori sedang dengan capaian skor 64%. Analisis *chi square* menunjukkan terdapat perbedaan tingkat partisipasi dengan faktor yang mempengaruhi adalah sosialisasi, pelatihan yang diikuti, workshop dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). Berdasarkan hasil tersebut rekomendasi yang disarankan bahwa untuk menunjang keberhasilan program PUMP P2HP diperlukan partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan hingga akhir.

**Kata Kunci:** partisipasi, PUMP, pengolah, perikanan

#### ABSTRACT

*Community participation is essential in the success of program implementation of program on fisheries business development at village level the Processing and Marketing Business Development Program (PUMP-P2HP) in Indonesia. This study aims to 1). Identifying the level of community participation in the implementation of the program; 2). Identifying the difference in the level of community participation and the factors that affect the level of community participation in the implementation of P2HP PUMP. The research using survey method in 6 locations: Cirebon, Tangerang, Aceh, Sibolga, Makasar and Banjar. Data analysis method used descriptive frequency to determine the level of participation and the factors that influence and chi square analysis to know the difference in participation. The results showed the level of public participation in the preparation stage at 6 locations in the medium category at 58%, in the implementation at high stage category with a score of 77% and evaluation stages are categorized by performance score of 64%. Chi square analysis shows that there are differences in the level of participation with factors that affecting are socialization, training, workshop and Business Group Maritime Affairs and Fisheries. Base on those results, this study recommend that implementation of the PUMP-P2HP program should include community participation from the planning stage to evaluating stage.*

**Keywords:** participation, PUMP, processing, fisheries

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia pada setiap lapisan. Chambers *dalam* Nasikun (2001) mengatakan kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang terdiri atas lima dimensi yaitu: 1). Kemiskinan (*poverty*); 2). Ketidakberdayaan (*powerless*); 3). Kerentanan menghadapi situasi darurat (*vulnerability*); 3). Ketergantungan (*dependence*); dan 5). Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Permasalahan mendasar yang menjadi penyebab kemiskinan diantaranya adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial dan budaya, kurang/tidak adanya aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kualitas sumberdaya pelaku usaha serta kelembagaannya. Jadi kemiskinan bukan hanya tidak mampu secara ekonomi namun di berbagai aspek sehingga menumbuhkan ketidakmandirian. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak diam untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah masyarakat miskin yaitu dengan meluncurkan berbagai program dan kebijakan diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilakukan sejak tahun 2007. PNPM pada hakekatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan peningkatan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Nurkatamso, 2013).

Berdasarkan hasil beberapa kajian dapat disimpulkan bahwa masyarakat kelautan perikanan termasuk golongan masyarakat miskin. Oleh karena itu sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah menggiatkan pembangunan ekonomi nasional yang berbasis kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu program nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2009 yang terintegrasi dengan PNPM Mandiri induk di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Program tersebut mengacu pada tiga kluster program penanggulangan kemiskinan yang merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan, yaitu: (1) Bantuan dan perlindungan sosial; (2) Pemberdayaan masyarakat; dan (3) Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (Anonim, 2011). Ruang lingkup PNPM Mandiri KP terdiri atas perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran, usaha garam dan desa pesisir yang selanjutnya lebih dikenal dengan istilah Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) KP.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan selama ini memiliki peran penting dalam mencapai tujuan. Sejak pemerintahan Soeharto masyarakat sudah dilibatkan dengan bersifat "top-down" yaitu inisiatif penetapan kebijakan ditentukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat sedangkan untuk pelaksanaan program sepenuhnya diserahkan ke masyarakat. Meskipun model ini memiliki keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan yang dijumpai adalah masyarakat sering merasa tidak memiliki dan tidak merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan itu (Satrias, 2011).

PUMP P2HP merupakan upaya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah/pemasar ikan dalam wadah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). Tahapan PUMP P2HP sebagaimana tahapan pada program PUMP lainnya dibagi menjadi tiga yaitu persiapan/perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimana pada tiap tahapan memungkinkan masyarakat berperan secara langsung dan aktif pada tiap tahapannya. Mediawati (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa karena tujuan utama PNPM yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat maka tingkat partisipasi atau keterlibatan masyarakat penerima program secara langsung sangat penting artinya sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat maka hasil program akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Perbedaan karakteristik masyarakat akan mempengaruhi masyarakat baik dalam pengetahuan maupun pelaksanaan program PUMP P2HP yang nantinya akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program PUMP diperlukan partisipasi masyarakat sebagai objek pembangunan untuk turut serta merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program

tersebut. Didasarkan pada pemikiran adanya hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan keberhasilan program PUMP P2HP maka penelitian ini dilakukan dengan memiliki dua tujuan yaitu : 1). untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat penerima program PUMP P2HP dan 2). untuk mengetahui perbedaan partisipasi di tiap lokasi dan faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut.

## METODOLOGI

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan Januari hingga Desember 2014 yang merupakan bagian dari penelitian besar mengenai Evaluasi Dampak PNPM di Indonesia. Lokasi penelitian dilakukan di 6 daerah yang ditentukan secara sengaja karena mewakili penerima PUMP P2HP sejak tahun 2011 hingga 2012, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sibolga, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Banjar dan Kota Makassar.

### Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang dibatasi pada dimana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok (Singarimbun dan Effendi, 2004). Untuk menentukan sampel yang akan diambil maka digunakan teknik pengambilan sampel secara *stratified random sampling* yaitu sampel yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata dan kemudian memilih sebuah sampel secara random dari tiap strata (Nazir, 2003). Jenis data yang dikumpulkan yaitu primer dan sekunder yang terkait dengan bentuk program bantuan PUMP P2HP, tingkat partisipasi dan bentuk partisipasi dari masyarakat pada pelaksanaan program PUMP P2HP.

Dalam penelitian ini yang termasuk populasi adalah semua penerima BLM PUMP P2HP tahun 2011-2012 di 6 lokasi sejumlah 620 orang. Total jumlah sampel dari 6 lokasi sebanyak 62 responden. Data primer yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dengan para pengolah dan pemasar hasil perikanan yang menerima BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PUMP P2HP antara tahun 2011-2012 dan *stakeholder* terkait yang dibantu dengan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa pengumpulan

informasi baik dari media cetak maupun media elektronik serta laporan-laporan dinas terkait kegiatan PNPM terutama PUMP P2HP.

### Metode Analisis Data

Hasil tiap jawaban pada kuesioner mengenai tingkat partisipasi masyarakat diberikan nilai atau skor relatif untuk kemudian dilakukan klasifikasi dengan skala Likert dengan interval skor 1 dengan indikator rendah, skor 2 dengan indikator sedang, skor 3 dengan indikator tinggi (Nazir, 2003). Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama yaitu dengan membandingkan antara skor capaian partisipasi dengan skor partisipasi ideal sesuai indikator partisipasi pada tabel 1. Untuk mengukur tingkat partisipasi berdasarkan nilai skor partisipasi digunakan rumus sebagai berikut (Usman & Akbar, 2000):

$$X = \frac{\sum_{i=1}^n Xi}{n} \times 100 \%$$

Dimana :

X = Persentase nilai skor partisipasi capaian terhadap nilai skor partisipasi ideal/  
*The percentage of participation of the achievements of the score to the score the participation of the ideal.*

$X_i$  = Jumlah skor partisipasi capaian pada masing-masing kegiatan PUMP/  
*Total score achievements participation in each activity PUMP.*

N = Jumlah skor partisipasi ideal pada masing-masing kegiatan PUMP/  
*Total score of ideal participation in each activity PUMP.*

Kisaran nilai skor dan interpretasi untuk tingkat partisipasi dibagi menjadi tiga kelas, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Dari perbandingan tersebut ditentukan tingkat partisipasi program PUMP dengan kriteria :

< 52 % = rendah

53% – 76% = sedang

>76% = tinggi

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama yaitu dengan analisis deskriptif, dimana analisis tersebut untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi penerima PUMP P2HP di 6 lokasi pada tahapan persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Sedangkan untuk menganalisis hubungan antara sosialisasi, pelatihan,

**Tabel 1. Nilai Skor Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan PUMP P2HP Tahun 2012.**  
**Table 1. Score of Participation Rate in Implementation PUMP P2HP 2012.**

No	Pelaksanaan Kegiatan / Implementation	Indikator / Indicator	Skor / Score
<b>Persiapan / Preparation</b>			
1	Pendirian Kelembagaan KUKP / Form a group	1. Tidak berperan serta/ <i>No participate</i>	1
		2. Peran serta namun tidak mandiri/ <i>Participate but dependence</i>	2
		3. Peran serta dan membentuk secara mandiri/ <i>Participate and independent</i>	3
2	Pengesahan KUKP dan badan hukum / <i>Validation groups and legal entities</i>	1. Tidak berperan serta/ <i>No participate</i>	1
		2. Peran serta namun tidak mandiri/ <i>Participate but dependence</i>	2
		3. Peran serta dan membentuk secara mandiri/ <i>Participate and independent</i>	3
3	Penyusunan AD/ART / <i>Preparatioan AD/ART</i>	1. Tidak berperan serta/ <i>No participate</i>	1
		2. Peran serta namun tidak mandiri/ <i>Participate but dependence</i>	2
		3. Peran serta dan membentuk secara mandiri/ <i>Participate and independent</i>	3
<b>Pelaksanaan / Implementation</b>			
1	Penyusunan RUB / Preparation business plan	1. Tidak berperan serta/ <i>No participate</i>	1
		2. Peran serta namun tidak mandiri/ <i>Participate but dependence</i>	2
		3. Peran serta dan membentuk secara mandiri/ <i>Participate and independent</i>	3
2	Pencairan dana BLM / <i>Disbursement of funds</i>	1. Tidak berperan serta/ <i>No participate</i>	1
		2. Peran serta namun tidak mandiri/ <i>Participate but dependence</i>	2
		3. Peran serta dan menggunakan secara mandiri/ <i>Participate and independent</i>	3
3	Pelaksanaan usaha bersama / <i>Business execution</i>	1. Tidak berperan serta/ <i>No participate</i>	1
		2. Peran serta namun tidak mandiri/ <i>Participate but dependence</i>	2
		3. Peran serta dan melakukan usaha secara mandiri/ <i>Participate and independent</i>	3
<b>Evaluasi / Evaluation</b>			
1	Monitoring dan evaluasi / <i>monitoring and evaluation</i>	1. Tidak berperan serta/ <i>No participate</i>	1
		2. Peran serta namun hanya sebagian/ <i>Participate but only partially</i>	2
		3. Ikut peran serta secara keseluruhan/ <i>Participate as a whole</i>	3
2	Pelaporan/ <i>Reporting</i>	1. Tidak ikut menyusun laporan/ <i>Not involved make reports</i>	1
		2. Ikut menyusun laporan sebagian/ <i>Involved set partial reports</i>	2
		3. Ikut menyusun seluruh laporan/ <i>Involved set all reports</i>	3

workshop dan keberadaan KUKP terhadap tingkat partisipasi masyarakat menggunakan analisis statistik non parametrik *chi square* dengan bantuan *software* EViews. Uji *chi square* juga dapat digunakan untuk menentukan seberapa baik distribusi teoritis yang diperoleh dari data sampel (Spiegel, 1972).

Hipotesis yang digunakan adalah :

- H<sub>0</sub> Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat dari ikut tidaknya masyarakat pada sosialisasi program PUMP
- H<sub>a</sub> Terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat dari ikut tidaknya masyarakat pada sosialisasi program PUMP
- H<sub>0</sub> Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat dari banyaknya pelatihan yang pernah diikuti
- H<sub>a</sub> Terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat dari banyaknya pelatihan yang pernah diikuti
- H<sub>0</sub> Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat dari banyaknya workshop yang pernah dilakukan
- H<sub>a</sub> Terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat dari banyaknya workshop yang pernah dilakukan
- H<sub>0</sub> Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat dari keberadaan KUKP
- H<sub>a</sub> Terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat dari keberadaan KUKP

Rumus *chi square* yang digunakan adalah :

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

Dimana :

X : Chi Kuadrat

O : Frekuensi

E : Frekuensi Harapan

Kriteria pengujian:

**Jika  $\chi^2$  hitung  $\leq$   $\chi^2$  tabel maka H<sub>0</sub> diterima**

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antarvariabel, menurut Usman (2000), dapat diuji dengan rumus koefisien kontingensi sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + N}}$$

Di mana :

C = koefisien kontingensi

$\chi^2$  = harga  $\chi^2$  yang diperoleh

Selanjutnya harga C tersebut dibandingkan dengan C<sub>max</sub> dengan rumus: Di mana m = dipilih nilai minimum antara banyak kolom dengan banyak baris. Jika tidak ingin menghitung C<sub>max</sub>, maka nilai C tersebut dapat langsung dibandingkan dengan tabel C. Jika nilai C < nilai C<sub>max</sub> atau C tabel, maka hubungan kedua variabel kurang kuat.

## HASIL PEMBAHASAN

### Gambaran Umum PUMP P2HP

PNPM Mandiri KP merupakan program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan PNPM Mandiri secara nasional. PNPM Mandiri KP mengikuti delapan ciri-ciri dasar PNPM Mandiri, yaitu:

1. Mendukung tersedianya anggaran untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan skala desa/kelurahan masyarakat yang dicalirkan langsung oleh pemerintah ke rekening lembaga yang berbasis kelompok usaha/kelompok masyarakat ;
2. Ada pendampingan dan pengawasan secara menerus dari program;
3. Ada tindakan untuk memperkuat pemihakan kepada kepentingan kaum perempuan dan kaum yang hampir miskin;
4. Mendorong dan memperkuat peran dan fungsi kelembagaan yang berbasis kelompok usaha/kelompok masyarakat;
5. Pengambilan keputusan atas pendanaan kegiatan-kegiatan melalui musyawarah masyarakat atau musyawarah wakil-wakil masyarakat;
6. Masyarakat memilih dan mengevaluasi kinerja Tim Pengelola Kegiatan dan Dana secara demokratis;
7. Pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh organisasi/kelompok masyarakat; dan
8. Melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Program PNPM Mandiri KP memiliki 3 bentuk yaitu PUGAR (Pengembangan Usaha Garam Rakyat), PDPT (Pengembangan Desa Pesisir Tangguh) dan PUMP (Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan). Untuk mensinergikan ketiganya maka dibentuklah tim koordinasi yang dibawah langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PUMP-P2HP merupakan kegiatan pemberdayaan dimana salah satunya melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam wadah Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR). POKLAHSAR merupakan kelompok usaha kelautan dan perikanan bidang pengolahan dan pemasaran sebagai pelaksana PUMP-P2HP dalam penyaluran bantuan pengembangan usaha. PUMP-P2HP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan wirausaha bidang pengolahan dan pemasaran di pedesaan. PUMP P2HP dilakukan sejak tahun 2011 dengan jumlah nominal BLM yang tetap sama yaitu Rp 50 juta untuk setiap kelompok sebagaimana yang tersajikan pada Tabel 2.

Struktur organisasi PUMP P2HP terdiri atas:1). Kelompok Kerja (Pokja) dimana kelompok ini terdiri atas staf di Pemerintah Pusat yang melaksanakan semua tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi; 2). Tim Pembina yang dibentuk oleh Gubernur atau Kepala Dinas KP tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas KP atau Kepala Bidang P2HP; 3). Tim teknis, berada di tingkat kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati atau Kepala Dinas tingkat kabupaten/kota yang diketuai oleh Kepala Dinas kabupaten/kota atau kabid yang menangani PUMP P2HP; dan 4). Tenaga pendamping, yang direkrut di tiap daerah untuk mendampingi dan membantu POKLAHSAR selama pelaksanaan PUMP. Pelaksanaan PUMP P2HP dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu:

Persiapan, yang termasuk dalam tahapan ini adalah sosialisasi mengenai program yang dilakukan di lokasi penerima BLM yang dilanjutkan dengan identifikasi dan verifikasi POKLAHSAR

calon penerima BLM. Jika belum terbentuk kelompok maka dilakukan pembentukan POKLAHSAR yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan AD/ART dan pengesahan kelompok. Pada dua tahapan ini di banyak lokasi tidak dilakukan sehingga banyak teridentifikasi POKLAHSAR yang kelembagaannya tidak berjalan.

Pelaksanaan, POKLAHSAR yang lolos verifikasi kemudian menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) mengenai rencana penggunaan BLM yang akan diperoleh dengan dilengkapi dokumen-dokumen administrasi sesuai yang disyaratkan dalam Pedoman Teknis. Setelah RUB diverifikasi dan diterima maka proses selanjutnya adalah pencairan dana. Sesuai ketentuan yang ada BLM yang diterima harus dalam bentuk barang operasional untuk mendukung usaha. Dalam proses pencairan hingga penggunaan dana peran tenaga pendamping sangat diperlukan agar tidak ada penyelewengan dan tertib secara administrasi.

Monitoring dan evaluasi. Tahapan terakhir ini dilakukan oleh Pokja atau tim pembina untuk melihat penggunaan dana BLM yang diterima. Tim pembina dan tim teknis pada tahapan ini secara rutin melakukan monitoring langsung ke lapangan untuk melihat keberlanjutan usaha dari penerima PUMP P2HP. Tiap POKLAHSAR juga diwajibkan untuk membuat laporan perkembangan usaha setelah menerima bantuan yang wajib disampaikan kepada tim teknis sebagai bahan evaluasi.

Indikator keberhasilan *output* dari PUMP P2HP adalah: 1) Tersalurkannya BLM kepada 1.500 Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) di 33 Propinsi; dan 2) Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan POKLAHSAR melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan (DJP2HP, 2013). Berdasarkan indikator tersebut maka kinerja *output* di 6 lokasi penelitian termasuk berhasil karena target tercapai dan penguatan kapasitas dan kelembagaan POKLAHSAR mulai berkembang ke arah lebih baik.

**Tabel 2. Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUMP P2HP di Indonesia.**

*Table 2. The allocation of Direct Aid Community PUMP P2HP in Indonesia.*

Tahun/Year	Jumlah Poklahsar/ Number of Group	Nilai (Rp) / Value (IDR)
2011	408 kelompok / 408 groups	20.4 Miliar/ 20,4 billion
2012	1.500 kelompok / 1.500 gorups	75 Miliar/ 75 billion
2013	1.500 kelompok/ 1.500 groups	75 Miliar/ 75 billion

Sumber : Dirjen P2HP, 2014/ Source: Dirjen P2HP, 2014

**Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Program PUMP P2HP**

PUMP P2HP bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama pemasar dan pengolah hasil perikanan dengan mengembangkan kewirausahaan masing-masing orang. Jika membicarakan pemberdayaan masyarakat maka erat sekali kaitannya dengan partisipasi dari masyarakat tersebut. Nasdian (2006) mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

Partisipasi penerima BLM dalam PUMPP2HP merupakan gambaran keikutsertaan para pemasar dan pengolah dalam pelaksanaan program PUMP yang dilihat dari beberapa indikator. Berdasarkan analisis terhadap skor partisipasi diperoleh hasil sebagai berikut (Tabel 3).

Pada tahap persiapan tingkat partisipasi responden tertinggi pada bagian pendirian kelembagaan KUKP atau kelompok, namun itu pun masih masuk dalam kelas sedang. Jadi meskipun berperan serta namun tidak dalam semua tahapan pembentukan kelompok responden ikut aktif. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan responden berpartisipasi tinggi pada saat penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB).

**Tabel 3. Tingkat Partisipasi Poklhasar (n=62) dalam Pelaksanaan Program PUMP P2HP Tahun 2011-2012.**

**Table 3. Participation Rate Respondent ( n = 62 ) in Implementation Program PUMP P2HP 2011-2012.**

No	Bentuk Kegiatan / Form of Activity	Sebaran Jawaban Responden/ Distribution of Respondents Answer			Rata- rata nilai/ Mean value	Skor ideal/ Ideal score	Capaian (%) / Achievement (%)	Keterangan/ Description
		1	2	3				
<b>Persiapan / Preparation</b>								
1	Pendirian Kelembagaan KUKP/ Form a group	9	33	14	2.09			
2	Pengesahan KUKP dan badan hukum / Validation groups and legal entities	33	12	11	1.61			
3	Penyusunan AD/ART/ Preparation of AD/ART	30	18	8	1.61			
<b>Total Skor/Total Score</b>					<b>5.30</b>	<b>100</b>	<b>58.93</b>	<b>Sedang/ Medium</b>
<b>Pelaksanaan/Implementation</b>								
1	Penyusunan RUB/ Preparation of business plan	8	38	10	2.04			
2	Pencairan dana BLM/ Disbursement of funds	5	23	28	2.41			
3	Pelaksanaan usaha bersama / Business execution	4	19	33	2.52			
<b>Total Skor/Total Score</b>					<b>6.96</b>	<b>100</b>	<b>77.38</b>	<b>Tinggi/High</b>
<b>Evaluasi/Evaluation</b>								
1	Monitoring dan evaluasi/ Monitoring and Evaluation	24	17	15	1.80			
2	Pelaporan / Reporting	13	28	15	2.04			
<b>Total Skor / Total Score</b>						<b>100</b>	<b>63.99</b>	<b>Sedang/ Medium</b>

Sumber : Data primer diolah, 2014/ Source: Primary Data Processed, 2014

Namun sama dengan tahap persiapan partisipasi di tahapan ini hanya masuk kelas sedang karena dalam proses penyusunan RUB masih dibantu oleh tenaga pendamping. Di tahap evaluasi tingkat partisipasi responden dalam hal pelaporan termasuk tinggi karena memang penyusunan laporan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses penyaluran BLM. Tabel 3 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di setiap tahapan secara lebih merinci.

Pelaksanaan program PUMP P2HP dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tabel 1 dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat penerima BLM berbeda-beda di tiap tahapan. Di tahapan persiapan yang terdiri atas pembentukan KUKP atau POKLAHSAR hingga pengesahan dan penyusunan AD/ART tingkat partisipasi masyarakat masuk kategori sedang. Hal ini karena sebagian besar POKLAHSAR di lokasi penelitian dibentuk memang bertujuan untuk penyaluran bantuan bukan dengan kesadaran sendiri dari tiap anggota. Begitu pula dalam hal pengesahan dan penyusunan AD/ART POKLAHSAR biasa dibantu oleh tenaga pendamping dan hanya dilakukan oleh pengurus dalam kelompok tanpa mengikutsertakan anggota lainnya.

Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan indikator yang digunakan dalam pengukuran partisipasi adalah penyusunan RUB, pencairan dana BLM dan pelaksanaan usaha atau penggunaan dana untuk usaha. Pada tahapan ini tingkat partisipasi penerima BLM masuk kategori tinggi. Ini berkaitan dengan pedoman teknis PUMP bahwa dana BLM langsung cair ke rekening tiap POKLAHSAR maka secara tidak langsung tiap POKLAHSAR lebih aktif pada tahapan ini. Biasanya terdapat pembagian tugas mulai dari pencairan dana di bank, pembelanjaan dana untuk alat-alat sesuai RUB dan pembagian peralatan kepada tiap anggota dan POKLAHSAR juga bertanggung jawab dalam administrasi pembelanjaan. Pada tahapan ini peran tenaga pendamping hanya mendampingi agar proses berjalan sebagaimana mestinya namun tidak ikut campur mengenai teknis pembelanjaan dan pertanggung jawabannya.

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahapan terakhir masuk kategori sedang karena tidak semua penerima BLM membuat laporan perkembangan usaha terkait PUMP dengan baik dan juga tidak semua lokasi dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim teknis atau tim pembina. Berdasarkan ketentuan pada pedoman teknis bahwa setiap

**Tabel 4. Tingkat Partisipasi Responden dalam Tahapan PUMP P2HP.**

**Table 4. Level of Participation of Respondents in Stage PUMP P2HP.**

No	Tahapan / Stages	Tingkat Partisipasi Responden (%) / Level of Participations (%)		
		Rendah / Low	Sedang/Medium	Tinggi/High
<i>Persiapan / Preparation</i>				
1	Pendirian Kelembagaan KUKP/ <i>Form a group</i>	12,50	52,38	42,42
2	Pengesahan KUKP dan badan hukum/ <i>Validation groups and legal entities</i>	45,80	19,05	33,33
3	Penyusunan AD/ART / <i>preparation of AD/ART</i>	41,67	28,57	24,24
<i>Pelaksanaan / Implementation</i>				
1	Penyusunan RUB / <i>Preparation of business plan</i>	47,06	47,5	14,08
2	Pencairan dana BLM / <i>Disbursement of funds</i>	29,41	28,75	39,44
3	Pelaksanaan usaha bersama / <i>Business execution</i>	23,53	23,75	46,48
<i>Evaluasi / Evaluation</i>				
1	Monitoring dan evaluasi / <i>Monitoring and evaluation</i>	64,86	37,78	50,00
2	Pelaporan / <i>Reporting</i>	35,14	62,22	50,00

Sumber : Data primer diolah, 2014/ *Source: Primary Data Processed, 2014*



POKLAHSAR penerima BLM wajib membuat laporan perkembangan usaha yang dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan di lokasi masing-masing.

Jika nilai total dari ketiga tahapan dijumlahkan kemudian diperoleh rata-rata nilai sebesar 66 % menandakan secara keseluruhan tingkat partisipasi POKLAHSAR penerima BLM pada pelaksanaan program PUMP P2HP masuk kategori sedang. Ini berarti sudah ada sebagian masyarakat yang berperan secara aktif pada tiap tahapan namun terdapat juga sebagian masyarakat yang belum peduli dan kurang berperan baik. Hal ini mengakibatkan tujuan utama program ini untuk meningkatkan pemberdayaan masih belum tercapai dengan optimal.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Program PUMP P2HP**

Perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUMP P2HP dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : sosialisasi program, pelatihan yang pernah diikuti, workshop dan poklhasar itu sendiri. Untuk menganalisis perbedaan tingkat partisipasi tersebut digunakan analisis chi square dengan hasil sebagai berikut (Tabel 5):

Pada Tabel 5 diperoleh hasil bahwa nilai chi square hitung dari tiap indikator melebihi nilai chi square tabel itu berarti keempatnya memiliki pengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat.

**a. Sosialisasi Program**

Sosialisasi merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program yang

bersifat nasional karena menjadi pintu pembuka bagi masyarakat dan stakeholder terkait dalam memahami program tersebut. Menurut Dinkes Jakarta (2005) sosialisasi adalah penyebaran informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Berdasarkan hasil analisis *chi square* diatas menggambarkan bahwa dari 6 lokasi terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat dari pernah tidaknya pengolah perikanan mengikuti sosialisasi program PUMP P2HP.

Sosialisasi yang baik mengenai suatu program nasional adalah penyampaian informasi yang baik dan benar dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti mulai dari tingkat pusat hingga calon penerima bantuan. oleh karena itu bentuk sosialisasi menjadi salah satu faktor yang menentukan besar tidaknya partisipasi masyarakat. Lokasi yang sosialisasinya baik maka dapat memilih calon penerima yang tepat sasaran sehingga bantuan yang diberikan juga bisa bermanfaat dalam meningkatkan perkembangan usaha.

**b. Pelatihan yang pernah diikuti**

Selama berjalannya program PUMP P2HP juga dilakukan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk peningkatan keterampilan dan pengembangan diri dari para pemasar dan pengolah yang menerima bantuan. Menurut Siagian (2008) definisi pelatihan adalah :Proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metoda tertentu secara konsepsional. Jadi pelatihan termasuk hal penting yang sebaiknya rutin dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

**Tabel 5. Hasil Analisis Chi Square untuk Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Sosialisasi, Pelatihan, Workshop dan Keberadaan KUKP pada Pelaksanaan PUMP P2HP Tahun 2011-2012.**

**Table 5. Chi Square Analysis for Level of Public Participation Based on Socialization, Training, Workshop and KUKP Presence on Implementation of PUMP P2HP 2011-2012.**

Variabel Penentu Partisipasi / <i>Determinant Variables</i>	Chi Square hitung / <i>Chi Square value</i>	Perbedaan Partisipasi / <i>Difference in Participations</i>
Sosialisasi program/ <i>Socialization program</i>	36,419	Berbeda / <i>Different</i>
Pelatihan yang pernah diikuti/ <i>Training</i>	9,419	Berbeda / <i>Different</i>
Workshop / <i>Workshop</i>	24,419	Berbeda / <i>Different</i>
Keberadaan KUKP / <i>Group Existence</i>	26,355	Berbeda / <i>Different</i>

$\alpha$  0,05, 2 = 5,99

Sumber : Data primer diolah, 2014 / Source: Primary Data Processed, 2014

dalam aktivitas ekonomi, karena semakin sering masyarakat mengikuti pelatihan maka pemikiran mereka akan semakin terbuka terutama dalam menerima program-program dan teknologi baru (Lastinawati, 2011). Dari hasil analisis *chi square* diperoleh hasil bahwa terjadi perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari pernah tidaknya responden mengikuti pelatihan-pelatihan usaha yang selama ini dilakukan oleh Dinas KP. Suatu lokasi yang sebagian besar respondennya sudah pernah mengikuti pelatihan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang respondennya tidak pernah atau jarang mengikuti pelatihan.

Selain itu banyaknya jumlah dan jenis pelatihan yang diikuti oleh penerima BLM mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUMP P2HP. Semakin banyak jenis pelatihan yang dilakukan oleh dinas di suatu lokasi maka akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi suatu program termasuk di dalamnya PUMP. Hal ini didasari dengan keinginan dari masyarakat tersebut bahwa selain bantuan berupa modal atau bahan baku tapi mereka juga butuh tambahan ilmu pengetahuan baru yang bisa bermanfaat bagi usaha pemasaran dan pengolahan mereka. Dan ilmu pengetahuan ini bisa diperoleh melalui pelatihan-pelatihan.

**c. Workshop**

*Workshop* atau lokakarya adalah suatu acara dimana beberapa orang bertemu untuk mencari solusi dari suatu masalah yang diangkat menjadi topik dalam pertemuan itu. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PUMP P2HP maka workshop bisa dikatakan pertemuan antara pengolah dan pemasar hasil perikanan dengan dinas terkait dalam membicarakan permasalahan terkait usaha pengolahan dan pemasar. Pernah atau tidaknya *workshop* yang dilakukan oleh dinas di suatu lokasi dan diikuti oleh masyarakat penerima BLM juga dijadikan indikator dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil analisis *chi square* diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dilihat pernah tidaknya workshop dilakukan oleh Dinas KP yang juga diikuti oleh masyarakat di daerah tersebut.

**d. Keberadaan KUKP (Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan)**

Sesuai dengan pedoman teknis PUMP bahwa masyarakat yang menerima BLM adalah

masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) hasil perikanan. Oleh karena itu kelompok menjadi bagian penting dalam penyaluran PUMP P2HP di Indonesia. POKLAHSAR yang baik adalah yang terbentuk karena keinginan dari tiap anggotanya tanpa ada paksaan atau ancaman sehingga apapun yang dilakukan sesuai dengan tujuan dari kelompok. Namun yang terlihat pada sebagian besar POKLAHSAR penerima BLM justru sebaliknya dimana kelompok tersebut merupakan kelompok bentukan dinas atau tenaga pendamping hanya agar bisa memperoleh BLM. Tidak semua anggota kelompok memiliki usaha pengolahan atau pemasaran bahkan banyak yang tidak mengerti dasar dan tujuan dari pembentukan kelompok. Yang tertanam di pemikiran mereka bahwa jika tergabung dalam kelompok maka mereka akan dengan mudah mendapatkan BLM. Padahal esensi dari PUMP P2HP adalah pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mengembangkan diri dalam kewirausahaan melalui suatu wadah yang disebut kelompok.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberadaan masyarakat di suatu KUKP juga dijadikan variabel untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program PUMP P2HP. Hasil analisis menjelaskan bahwa faktor ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakatnya di suatu lokasi. Lokasi yang POKLAHSAR penerima BLM nya dibentuk berdasarkan keinginan sendiri dan dimengerti oleh masing-masing anggotanya maka akan memperlihatkan tingkat partisipasi yang tinggi dibandingkan dengan lokasi yang POKLAHSARnya merupakan bentukan secara instan.

**Tabel 6. Nilai C Hitung Tiap Variabel.**  
**Table 6. C Hitung Value Each Variable.**

No	Variabel / Variable	Nilai C / C Value
1	Sosialisasi / <i>Socialization</i>	0,608
2	Pelatihan / <i>Training</i>	0,363
3	Workshop / <i>Workshop</i>	0,532
4	Keberadaan KUKP / <i>Existence</i>	0,546

Sumber : Data primer diolah, 2014/ Source: Primary Data Processed, 2014

Sedangkan untuk melihat keeratan hubungan antara setiap variabel diatas dengan tingkat partisipasi dilakukan dengan mencari nilai koefisien kontingensi. Dari tabel 3 dapat

disimpulkan bahwa meskipun tingkat partisipasi POKLAHSAR dipengaruhi oleh variabel sosialisasi, pelatihan, workshop dan keberadaan KUKP namun keempatnya tidak memiliki pengaruh yang kuat terlihat dari angka C hitung tiap variabel  $< C_{max}$ . Dimana nilai  $C_{max}$  adalah 0,707.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

### Kesimpulan

Partisipasi masyarakat penerima BLM berbeda-beda untuk tiap tahapan. Pada tahapan awal atau persiapan yang terdiri atas pembentukan kelompok, penyusunan AD/ART dan pengesahan kelompok terlihat partisipasi masyarakat tergolong tidak rendah namun juga tidak tinggi. Tiap lokasi melakukan cara yang berbeda pada tahapan ini namun sebagian besar kurang melibatkan masyarakat. Pada tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan yang terdiri atas penyusunan RUB, pencairan dana dan pelaksanaan usaha terlihat peran serta masyarakat sangat tinggi karena memang pada tahapan ini semua proses diserahkan pada kelompok dan dinas serta tenaga pendamping tidak bisa ikut campur. Tahap terakhir yang terdiri atas monitoring evaluasi dan pelaporan tingkat partisipasi masyarakat masuk kategori sedang. Hal ini karena tidak semua POKLAHSAR melakukan pelaporan secara rutin dan baik.

Faktor eksternal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program PUMP P2HP. Faktor tersebut yaitu sosialisasi, pelatihan, workshop/ lokakarya dan keberadaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP).

### Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat partisipasi masyarakat pada program PUMP P2HP di Indonesia maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan, yaitu :

1. Perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PUMP-P2HP) karena program ini merupakan program yang sifatnya *bottom up* dan juga agar tujuan dari program bisa mengakomodir kebutuhan dari masyarakat.
2. Perlu dilakukan monitoring, dan evaluasi dari tim teknis PUMP P2HP secara kontinyu, agar tidak terjadi penyimpangan dalam program PUMP, sehingga program tersebut tidak

hanya sekedar menjadi program formal saja tetapi dapat berkelanjutan dan mewujudkan masyarakat yang mandiri.

3. Dukungan dan kerjasama dalam wujud sosialisasi dan pendampingan dari segenap elemen pemerintah (Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, penyuluh perikanan, PPTK), dan masyarakat (tokoh masyarakat, POKLAHSAR penerima bantuan dan non penerima bantuan) secara bersama-sama akan mendukung keberhasilan pelaksanaan PUMP-P2HP.
4. Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor internal masyarakat seperti sikap masyarakat, tingkat pendidikan, pengalaman usaha, dan usia pelaku usaha. Faktor ini juga perlu dikaji lebih lanjut untuk melengkapi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. PNPM Mandiri Menyentuh Nelayan. Tersedia pada laman <http://www.kkp.go.id>. Diakses pada 23 April 2013.
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 2013. Pedoman Teknis Pelaksanaan PUMP P2HP. Jakarta.
- Lastinawati, E. 2011. Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Kab. OKU. *Jurnal Agronobis* Vol.3 (5) : 47-57.
- Mediawati, T. Y. 2011. Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Studi di Kelurahan Tegalgede, Sumbersari dan Desa Pontang, Ambulu). Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nasdian, F. T. 2006. Pengembangan Masyarakat (Community Development). Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nasikun. 2001. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Nazir, M. 2003. Metode Penelitian. PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Nurkatamso, A. dan U. Listyaningsih. 2013. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia* Vol 2 (2). Yogyakarta.
- Satries, W.I. 2011. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. *Jurnal Kybernan* Vol 2 (2) : 89-130.
- Singarimbun, M. dan S. Effendi. 2004. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Siagian, S. P. 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Spiegel, M. R. 1972. *Theory and Problems of Statistics in SI Units*. Mc Graw-Hill Book Company. New York.
- Usman, H. dan P. S. Akbar. 2000. *Pengantar Statistika*. Bumi Aksara. Jakarta.